

# MENULIS SEJARAH KELOMPOK MINORITAS, UNTUK SIAPA? : 'Cina Medan' 1930-1960 <sup>1</sup>

Nasrul Hamdani <sup>2</sup>

## ***Pendahuluan***

Sejarah biasa diterjemahkan sebagai cerita-cerita dari masa lampau, yang disampaikan melalui tulisan maupun penuturan agar diketahui dan jadi pelajaran untuk mengidentifikasi diri di masa kini. Dalam konteks ini, sejarah tentu (akan) penting artinya (terutama) bagi komunitas *diaspora* seperti orang Cina di Indonesia. Mengapa Cina? Dalam struktur masyarakat Indonesia, Cina adalah kelompok minoritas penguasa ekonomi, perdagangan dan industri dalam negeri. Jumlah anggota kelompok migran asal Tiongkok ini (konon) hanya 3%, tetapi menguasai-mengendalikan 70% kegiatan ekonomi, perdagangan serta industri. Inilah gambaran provokatif betapa penting sekaligus begitu rentan posisi orang Cina di Indonesia. Di negeri ini, dominasi ekonomi (juga sejarah) Cina adalah 'masalah'; 'berakar dari masalah, tumbuh sebagai masalah dan berkembang dengan masalah'

Masalah-masalah itu, direpresentasikan dengan anekdot: 'sebenarnya *shio* orang Cina tersisa tiga, yaitu sapi, kelinci dan kambing'. Pernyataan itu, sekalipun berseloroh memiliki alasan yang kuat. Sejarah di negeri ini merekam sejumlah aksi rasis (anti-Cina) dari masa kolonial, Jepang, sampai kemerdekaan dan masa sesudahnya. Sepanjang itu, orang Cina merasa diperlakukan seperti sapi (perahan), kelinci (percobaan) dan kambing (hitam)

---

<sup>1</sup> Disajikan pada Konferensi Nasional Sejarah VIII, Jakarta 15-17 Nopember 2006.

<sup>2</sup> Sejarahwan Partikelir; Wakil Sekretaris MSI cabang Sumatera Utara; Pengajar Muda (Asisten) Tidak Tetap pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Sastra USU (BHMN), Medan.

segala persoalan dalam relasi sosial Cina dengan warga bumiputera dan penguasa. Hal ini secara tidak langsung membuat orang Cina tidak pernah menjadi atau setidaknya dianggap 'orang kita' oleh warga bumiputera. Dalam pikiran warga bumiputera orang Cina adalah tamu yang tidak memiliki hak untuk memiliki apa yang hak tuan rumah.

Mengapa orang Cina belum juga dianggap sebagai 'orang kita'? Berbagai alasan bisa dikemukakan, tetapi kesenjangan ekonomi antara 'tuan rumah' dengan 'tamunya', menjadi alasan klasik yang dapat diterima. Penggunaan istilah 'bufferages' dan atau 'middlemen minority' oleh pengkaji masyarakat Cina dan peminat fenomena multikulturalisme dalam sejarah Indonesia menyiratkan adanya kesenjangan itu. Belum lagi pandangan stereotipik warga bumiputera terhadap Cina yang disebut-sebut enggan bergaul, tertutup, lebih memilih hidup mengelompok dalam sebuah kompleks yang menyendiri, rumahnya berpagar tinggi juga berpintu besi. Di Indonesia, kenyataan seperti ini terlanjur dipandang sebagai salah satu kendala dalam proses pembauran dan peng-Indonesia-an orang Cina yang berlangsung hampir bersamaan dengan resinifikasi *Huaqiao*, sekitar tahun 1949-1965.

Sifat eksklusif orang Cina terutama di kota-kota di Indonesia yang identik dengan Cina merupakan masalah sosial yang diwariskan dan masih menjadi persoalan hingga saat ini. 'Chinese Kwestie' pada awal abad ke-20 dan 'Masalah Tjina' sejak tahun 1950-an menunjukkan adanya kesinambungan pandangan rejim tentang aktifitas ekonomi orang Cina. Baik rejim kolonial maupun Republik pada saat itu berusaha mereduksi kekuatan ekonomi orang Cina melalui tindakan politis. Sampai tahun 1928, *gubernemen* giat mengawasi aktifitas orang Cina di Hindia setelah

mengetahui ada ikatan politik yang erat antara Huaqiao dengan kaum nasionalis di daratan Cina. Pemerintah Republik pun bertindak serupa ketika orientasi politik Huaqiao terbelah. Masalah Tjina mencapai klimaks setelah G30S. Di sinilah titik nadir nasib orang Cina: kambing hitam peristiwa kelam, kelinci percobaan asimilasi total dan sapi perahan aparat pemerintah juga alat kekuasaannya.

Merasa selalu dikorbankan membuat orang Cina membangun mekanisme pertahanan berbasis kemampuan mayoritas orang Cina di bidang ekonomi. Di kota yang identik dengan orang Cina seperti Medan, modal, keahlian dan informasi hampir sepenuhnya dikuasai borjuasi dagang Cina secara turun temurun dan tertutup bagi golongan yang bukan Cina. Sebab itu 'sifat-sifat eksklusif orang Cina' yang dicirikan mempertahankan bahasa ibu, bergaul sesama Cina dan mengembangkan kebiasaan Cina di tempat yang jauh dari kampung halamannya. Dari pencirian ini muncullah istilah 'Cina Medan' untuk menunjuk orang-orang Cina dari Medan dengan 'tingkah laku khas Medan, atau berlagak Medan'. Dalam konteks ini Cina Medan adalah kategori sosial sekaligus entitas yang menyimpan fragmen sejarah generasi Cina totok yang dipandang sebagai masalah sejak masa kolonial.

### ***Cina Medan: Sejarah dan Lupa***

Sejarah perantauan orang Cina di Deli (Medan) merupakan bagian unik dari sejarah kawasan yang berjudul *Het Dollar land* sejak pembukaan kebun tembakau. Sampai tahun 1930, orang Cina (totok) merupakan komunitas terbesar di kota-kota Sumatera Timur jumlahnya 44.117 jiwa (Cina

di Medan berjumlah 27.287 jiwa).<sup>3</sup> Komposisi totok yang demikian besar ini memungkinkan kebudayaan asli berkembang dengan baik di Medan. Sekitar 6% Cina peranakan menyebut golongan ini *Singkhe* (tamu baru) yang tidak beradab. Totok pun demikian, menyebut peranakan bukan bagian dari mereka sebab tidak lagi berbudaya Cina dan (terpenting) tidak bisa berbahasa Cina (*Kuo-yu*). Urusan sentimentil ini membuka perseteruan panjang antara totok dan peranakan terutama di Jawa, dan mencapai puncaknya ketika Indonesia merdeka.

Menjelang PD II, Cina totok yang belajar dari pengalaman pahit mulai mengambil alih peran peranakan di berbagai bidang dan mencapai puncak saat perang berakhir. Persaingan totok dan peranakan ditandai dengan berakhirnya dominasi golongan peranakan di dunia bisnis.<sup>4</sup> Dari sukses inilah totok eksis sebagai golongan baru dalam ekonomi Indonesia, terus bertahan dengan lahirnya generasi totok baru di perantauan. Satu hal yang menjadi penanda Cina totok dan keturunannya adalah tidak bisa atau sulit berbahasa Melayu.<sup>5</sup> Indikasi ketotokan suatu komunitas Cina juga dapat dilihat dengan tetap dipeliharanya sistem sosial asli seperti di negeri Cina, seperti *hui* dan *kong-si* sekalipun ia berada jauh di luar Tiongkok, seperti di Medan.

Berdasarkan tulisan J.L. Vleming Jr. (1989), kongsi merupakan organisasi modal orang Cina. Secara leksikal ia merupakan gabungan dari kata *kong* yang berarti usaha umum dan *si* yang berarti pengelolaan. *Kong-si* berarti pengelolaan hak milik bersama yang disertakan sebagai modal untuk memulai atau mengembangkan usaha melalui badan usaha yang legal

---

<sup>3</sup> Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*. Jakarta: Sinar Harapan, 1987, hal. 108.

<sup>4</sup> *Star Weekly*, 12 Mei 1946 dan 27 Oktober 1946

<sup>5</sup> Usman Pelly, *Urbanisasi dan Adaptasi, Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*. Jakarta: LP3ES, 1998, hal. 91.

(maupun ilegal). Badan usaha kongsi resmi biasanya mencoba mendapatkan berstatus NV (perseroan terbatas), CV (komanditer) atau *firma* bergantung modal dan jenis usaha.<sup>6</sup> Mengenai hui (serikat; identik dengan perkumpulan rahasia), perkebunan dan pemerintah di Sumatera Timur, lebih dahulu mengenalnya sebelum kongsi.

Indikasi kehadiran perkumpulan rahasia Cina di perkebunan ditandai dengan meningkatnya kasus penyerangan asisten kebun, pemogokan hingga kerusuhan. Awalnya perkebunan meyakini pesakitan yang disisipkan sebagai kuli dari Semenanjung yang membuat ulah di Sumatera Timur, namun anatomi gerakan kuli-kuli Cina itu menunjukkan pola yang biasa dipakai perkumpulan rahasia dalam menjalankan aksinya. Selain itu serangkaian aksi kriminal di perkebunan dapat dijadikan bukti bahwa *hui* ada. Seperti di negeri induk, *hui* biasa dimanfaatkan kelompok oposisi untuk melakukan aktifitas kontraproduktif, semacam penyusupan, propaganda dan sabotase, demikian terjadi juga di Medan. Pada tahun 1907 pemerintah mengeluarkan *Stadsblad* No. 271 tentang Penanggulangan Perkumpulan Rahasia Cina.

Bertahannya ketotokan Cina Medan ternyata didukung oleh suasana kota yang -menurut Edward Bruner- tidak memiliki budaya dominan. Secara administratif, Medan adalah kota tempat dua kekuasaan bersatu; sultan dan *gemeente*. Penduduk dalam masing-masing daerah dipisahkan oleh struktur sosial yang berbeda-beda. Bila di daerah sultan hierarki sosial disandarkan pada garis kekerabatan dan nilai-nilai feodal, hierarki sosial di kotapraja didasarkan pada aturan kolonial. Struktur masyarakat kolonial membagi masyarakat di kotapraja Medan menjadi tiga lapisan masyarakat yang

---

<sup>6</sup> J.L. Vleming, *Kongsi dan Spekulasi: Jaringan Kerja dan Bisnis Cina*. Jakarta: Grafiti. 1989, hal. 59-84.

terpisah secara sosial. Secara simbolik, orang Belanda, Eropa dan Jepang yang sedikit jumlahnya ditempatkan di puncak piramida dengan status yang lebih tinggi. Lapisan tengah ditempati warga dari golongan *Vreemde Oosterlingen*. Status sosialnya setingkat lebih tinggi dari masyarakat bumiputera (*Inhemschen*) yang ditempatkan di lapisan terbawah.<sup>7</sup>

Usman Pelly (1998) juga menambahkan, masyarakat kota Medan dalam kerangka sosial kolonial tumbuh bersama fenomena perkebunan dengan elite yang berbeda dengan *elite* kolonial sebelum liberalisasi ekonomi dan politik di Belanda (Kartodirdjo 1993 :335-369). Di Medan, golongan elite terdiri dari tuan kebon, pengusaha Belanda/Eropa, orang Jepang serta pegawai pemerintah. Bangsawan Melayu, orang-orang Cina kaya, pengusaha lain dari golongan Asia, kaum profesional bumiputera berpendidikan Barat seperti pegawai pemerintah, dokter, wartawan atau pengacara berada di lapis tengah. Seluruh kelompok bumiputera yang kebanyakan pendatang mengisi dasar struktur itu.

W.F. Wertheim (1965) menyebut sistem pelapisan masyarakat itu 'struktur kasta kolonial' yang rasis. Piramida itu merupakan sistem yang diterapkan sebagai aturan yang memisahkan masyarakat di kotapraja dalam kelas-kelas sosial berdasarkan relasi superior-inferior. Masing-masing kelas sosial diberi hak dan mempunyai kewajiban yang berbeda-beda sehingga timbul pembedaan, ketimpangan hingga ketegangan sosial yang bisa memuncak sewaktu-waktu. Seperti telah disebut, struktur ini otomatis memposisikan bumiputera 'selaku tuan rumah' lebih rendah dari masyarakat

---

<sup>7</sup> Pembagian/stratifikasi masyarakat Hindia Belanda ditetapkan dalam *Regering Reglement* (RR) 1885 pasal 270. Peraturan pemerintah ini kemudian menjadi rujukan *Nederlandsche Onderdaanschap van niet Nederlanders* tahun 1910 pasal 126 dan *Indische Staatreglement* (IR) tahun 1925 pasal 415 dan 447.

pendatang asing terutama dengan Cina yang menguasai bidang perdagangan. Penguasaan ini menguatkan posisi Cina sebagai warga 'kelas dua' yang memiliki hak istimewa.

Perdagangan dan ekonomi merupakan bidang yang dikuasai orang Cina sejak lama berkat *privilege* dari pemerintah. Cina mengelola perdagangan yang tidak dikerjakan kelompok *elite* juga yang tidak diserahkan kepada bumiputera. Tanpa pesaing berarti, mudah bagi Cina untuk membangun beragam usaha dagang dari tingkat pedagang keliling, pengecer di kampung-kampung sampai pedagang besar yang memiliki modal besar hingga dapat menguasai jaringan produksi dan distribusi. Dari aktifitas di jalinan rantai distribusi dan konsumsi ini orang Cina memperoleh keuntungan yang tidak sedikit. Laba perdagangan membuat hidup kebanyakan masyarakat Cina terkesan lebih maju dibanding kehidupan bumiputera.

Sejauh penulisan ini, jejak sejarah Cina di Medan di/berkaitan dengan kuli (buruh) dan perdagangan. Hal ini merupakan fakta yang diingat kebanyakan bumiputera. Sayangnya detil dinamika masyarakat Cina tidak pernah tampil secara terbuka, sebagai sejarah maupun identitasnya. Ada beberapa hal yang membentuk sikap enggan Cina Medan mengungkap sejarahnya, *pertama* rekayasa sosial di perantauan yang memberi peluang bagi pendatang untuk tidak berbaur; *kedua* romantisme sejarah dari negeri induk yang membuat generasi Cina terkagum-kagum (masa lalu yang superior); *ketiga* penerimaan warga bumiputera atas kehadiran orang asing hingga (yang berkenaan dengan) sejarah orang Cina pun dianggap asing.

Serba salah, canggung dan saling menakar diri dalam hubungan dengan warga bumiputera rupanya menimbulkan suasana kondusif bagi

stabilitas sosial meski timbul kesalahpahaman. Cina dan kelompok etnis lain sadar bahwa setiap kelompok memiliki kekuatan sosial yang merata, sehingga masing-masing dapat/terpaksa menahan diri untuk tidak memancing konfrontasi. Oleh sebab itu, untuk meluapkan hasrat berkonflik, tiap kelompok menyalurkannya melalui jalur yang beresiko rendah, yaitu memanfaatkan prasangka. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan istilah 'Cina'. Para Cina sepuh lebih suka mendengar dan mendorong penggunaan istilah 'Tionghoa' secara luas karena lebih santun dibanding istilah Cina yang dianggap hina. Demikian pula Cina, menyebut bumiputera *Hoa-na* yang berarti 'tidak bisa berbahasa *Hokkien*' -karena ada prasangka- istilah itu ditangkap sebagai penghinaan juga oleh bumiputera. Yang menarik, hampir tidak ada aksi-aksi yang diluahkan secara terbuka untuk menyelesaikan masalah akibat prasangka ini.

Mengenai sejarah, menurut Wang Gungwu, mengingat masa lalu bagi orang Cina di perantauan adalah pilihan, apakah memilih sejarah (dari negeri) sendiri yang diwariskan atau sejarah negeri yang didiami (masa lalu orang lain).<sup>8</sup> Bagi Cina Medan, sejarah berarti lupa meski kebanyakan kelompok Cina lain cenderung memilih salah satu dari dua ingatan itu atau mengakomodasi keduanya dalam alam pikirnya. Cina Medan memilih hal yang pertama untuk menegaskan identitas dengan mengetahui masa lalunya. Bagaimana sejarah kelompok minoritas itu memberi kontribusi bagi penataan masyarakat Sumatera Utara yang majemuk, terpecah-pecah, menyimpan potensi konflik dan penuh prasangka adalah soal yang utama.

---

<sup>8</sup> Wang Gungwu, 'Orang Etnis Cina Mencari Sejarah' dalam I.Wibowo (Ed.) *Harga yang Harus Dibayar, Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, Jakarta: Gramedia dan Pusat Studi Cina, 2001. hal. 7-26.



Cina Medan mengingat dengan baik sejarahnya, terutama mereka yang berada dalam rentang usia 35-96 tahun. Secara historis generasi ini memiliki kaitan langsung atau merasakan dampak beberapa peristiwa sepanjang 1930-1960. Cina sepuh (80-96 tahun) misalnya cukup memahami bagaimana perubahan dan kesinambungan itu; dampak perang Sino-Jepang di Sumatera dan Semenanjung, regionalisme Asia Tenggara, perkembangan perdagangan candu, bangun dan jatuhnya korporasi Cina sampai menjadi saksi perubahan politik di negeri induk dan Indonesia sesudah PD II. Ingatan itu dikenang dan disosialisasikan kepada generasi muda Cina secara informal melalui garis keturunan (keluarga), komunitas marga, komunitas kedai kopi (pertemanan) dan atau melalui kelompok dagang (kongsi).

Begitulah sejarah orang Cina disampaikan, namun dari perspektif lain sejarah orang Cina yang dinamis itu belum digarap serius sebagai aksi mengingat masa lalu untuk menegaskan jati diri. Padahal dari segi antropologis, Cina Medan unik, punya modal dan peluang untuk menampilkan masa lalunya secara terbuka, bersanding dengan kisah-kisah masa lalu kelompok-kelompok etnis lain yang menampilkan sejarah perantauannya secara terbuka. Sayangnya Cina tidak begitu. Bagi kelompok bukan-Cina sejarah mereka adalah misteri, sehingga prasangka kepada orang Cina tetap lestari karena sejarah Cina tidak tampil untuk (setidaknya) menetralsir pandangan bumiputera yang cenderung curiga dengan orang Cina.

Usaha merekonstruksi sejarah orang Cina Medan sesungguhnya sudah dilakukan meski masih terbatas. Dua dari enam informan saya selama penelitian di tahun 2004-2005 menyusun memori kolektif yang bersifat pribadi mengenai sejarah orang Cina, tidak diterbitkan tetapi isinya

disosialisasikan di kalangan keluarga. Usaha yang lebih terbuka belum dilakukan, walaupun ada pilihan topiknya bersifat populer seperti pembauran dan implikasinya. Sejarah dalam lokalitas sempit masih belum mendapat tempat, sejauh penelusuran belum ada literatur yang membahas Cina Medan secara khusus. Agaknya ini sejalan dengan pendapat Twang Peck Yang (2005) yang menyebut kajian Cina di Indonesia seolah-olah terfokus pada tema-tema besar dalam ruang lingkup yang luas sehingga cenderung 'melupakan' kelompok-kelompok (etnis) Cina yang berada di kota-kota kecil di luar Jawa dengan segala persoalan hidup dan keunikannya

Usaha terkini untuk merekonstruksi sejarah Cina Medan menghadapi banyak hambatan yang umumnya berasal dari orang Cina sendiri. Oleh sebab itu upaya merangkai sejarah orang Cina adalah tantangan. Penolakan dan sifat sulit untuk percaya pada orang lain terutama bukan Cina menjadi kendala utama, padahal Cina adalah kelompok minoritas yang paling penting kedudukannya, menaruh kepercayaan dengan pengawasan ketat bukanlah hal sulit bagi Cina yang memiliki jaringan sosial kuat. Setiap penyelewengan kepercayaan dapat diatasi mekanisme keras melalui tangan kongsi/hui. Begitupun, sekat-sekat sosial yang terbangun di Medan akibat ketiadaan budaya dominan Cina tidak ingin membagi potensi ekonominya kepada kelompok yang secara politis tidak bisa memberi mereka kompensasi.

Inilah perilaku yang paling dikenang kelompok bumiputera. Keakraban kelompok Cina dengan pejabat pemerintah dan (belakangan) militer semakin menguatkan pandangan negatif tentang Cina. Cina suka menyuap atau melayani pejabat dengan uang dan kesenangan agar segala urusan yang

berkenaan dengan perniagaan tidak direpotkan. Sebaliknya, apa yang dilakukan Cina itu -menurut pengakuan orang Cina- merupakan keterpaksaan, tidak ada usaha selain memenuhi keinginan pejabat yang (terkesan) bersih itu. Dengan keterpaksaan itu bukan hal yang aneh bila sejarah (asal-usul), jaringan sosial, keahlian dan lain-lain tidak dikembangkan secara terbuka, karena orang Cina meyakini sejarah bukanlah hal yang penting dalam kegiatan ekonomi. Wang Gungwu menyebut, orang Cina sebagai individu tidak memiliki suasana batin yang reflektif, juga tidak ada karya sastra besar yang ditulis untuk mengenang masa lalu.<sup>9</sup>

Benarkah situasi ini menyebabkan orang enggan mengenang masa lalunya? Secara kultural hal ini sangat mungkin mendorong 'pelupaan' masa lalu terutama menyangkut sisi gelap kehidupan di perantauan. Secara sosial, juga mungkin mengingat analisis dominant culture-nya E. Bruner (1974) dan Usman Pelly (1998) tidak saja memberikan penggambaran segregasi, tetapi peta pengkotak-kotakan alam pikir mengenai masa lalu. Di Medan, sejarah dan kesejarahan menjadi penting apabila etnisitas; simbol sekaligus pengikat solidaritas setiap unit politik masyarakat sama. Setiap unit politik di Medan menjadi kuat karena hidup berkelompok dengan sesama sukunya. Menjalin aliansi bila ada kesamaan tujuan dan atau 'mereka-reka' alienasi bila ada hal yang ingin diperebutkan dari unit lain. Ini membuat setiap unit politik etnisitas dalam masyarakat kota Medan tumbuh sama kuat sebagai kekuatan sosial dan politik, sekalipun ada etnis yang tergolong minoritas.

Dalam pemikiran sejarah, aktualitas di masa lalu dan kini memiliki hubungan yang sangat kuat. Seperti telah disebut, Cina bukan sekedar kelompok penguasa ekonomi, lebih dari itu, namun proses sejarah kelompok

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 31-32.

ini sedikit diketahui sehingga penting usaha rekonstruksi serius agar warisan sosial yang negatif itu berubah menjadi warisan yang bersifat integratif. 'Modal' untuk menulis sejarah orang Cina pun tergolong besar. Secara umum, (meski sifatnya relatif) warga senior Cina baik di tanah leluhur maupun di perantauan dikenal memiliki umur panjang, ingatan dan kesehatan yang terjaga berkat kemampuan ekonomi di atas rata-rata. Begitupun adanya, ingatan akan kenyataan di masa lalu terutama masa kolonial dan kemerdekaan cenderung disimpan untuk konsumsi sendiri dan komunitasnya.

Beberapa peristiwa yang penting direkonstruksi dari perjalanan sejarah Cina Medan yang di/terlupakan berada dalam satu babakan dalam sejarah (nasional) Indonesia. Hubungan dengan pengusaha perkebunan dan pemerintah kolonial sejak akhir abad ke-19 berlangsung dalam dinamika naik-turun. Periode awal pembukaan perkebunan tembakau, kuli (buruh) yang tidak mengetahui penanaman tembakau menerima perlakuan mengerikan dari tuan kebun, namun sesudah kedatangan kuli Jawa terjadi pergeseran. Kuli Cina menuai hasil dari pekerjaan di masa rintisan. Para tuan kebun memuji semangat dan kerja keras Cina yang tidak kenal lelah. Sebaliknya, kuli Jawa menerima perlakuan berbeda, meski di satu sisi ada hal-hal yang dapat dibanggakan dari kuli Jawa.<sup>10</sup>

Persaingan, perseteruan dan konflik di perkebunan di masa lalu dan kini tidak terlepas dari hubungan dari perlakuan ini. Mobilitas dan perkembangan masyarakat Cina yang mapan saat ini pun terkait dengan kebijakan dan model rekayasa sosial yang diskriminatif. Seluruh fenomena dirasakan namun belum ada suatu penjelasan utama maupun alternatif

---

<sup>10</sup> Lihat Jan Breman, *Menjinakkan Sang Kuli...*, Jakarta: Jakarta: Grafitipers & KITLV Jakarta, 1997 dan Karl J. Pelzer, *Tuan kebun dan Petani*, Jakarta: Sinar Harapan, 1987.

mengenai dinamika sosial di masa itu untuk memberikan pandangan rekonstruktif dan akomodatif di masa kini. Akibatnya, apa yang disebut dengan 'budaya perkebunan' itu tetap berpengaruh bagi masyarakat di Medan dan sekitarnya, ditandainya dengan tingginya disparitas sosial yang ditunjukkan oleh status ekonomi dan status hegemoni.

Selama masa revolusi, serangan-serangan atas orang Cina, hak milik orang Cina atau kepentingannya ditanggapi sebagai serangan atas kekuasaan status quo. Pada masa ini, berbekal dukungan politik penguasa status quo, partai nasionalis Cina, kemampuan ekonomi dan jumlah penduduk yang tergolong besar, warga Cina Medan membentuk badan keamanan khusus Cina (Pao An Tui) sehingga dapat menjaga kepentingan kelompok bahkan membalas serangan badan-badan perjuangan dari golongan bumiputera. Soal ini, selain mengubah peta politik dan keamanan masa revolusi, juga menunjukkan lemahnya koordinasi, komunikasi pemerintah dan adanya benturan sangat keras antara nilai-nilai primordial warga Cina dengan cita-cita nasional yang memang belum atau tidak pernah padu. Perselisihan internal di kalangan pejabat pemerintah republik dan pertikaian antara badan-badan perjuangan memperebutkan daerah kekuasaan dan sumber daya ekonomi semakin menjatuhkan citra pemerintah dan melemahkan strategi konfrontasi. Saat warga Cina muncul dengan kekuatan militernya, timbullah kekhawatiran bahwa jalan menuju integrasi nasional atau transformasi sosial akan semakin panjang.

Persoalan yang melanda masyarakat Cina Medan muncul lagi sesudah 27 Desember 1949. Seluruh warga Cina diberi kesempatan untuk memilih kewarganegaraan sebagai konsekwensi berakhirnya kolonialisme di

Indonesia dan disintegrasi politik yang melanda Republik Cina selama tahun 1948-1949. Di Medan, persaingan kaum nasionalis dan komunis tercermin dalam kampanye kewarganegaraan yang berlangsung sengit dan sarat konflik. Kubu nasionalis menawarkan kewarganegaraan Cina-Taiwan sedangkan kaum komunis yang membentuk negara dengan ideologi baru mendorong semua orang Cina di manapun berada untuk memilih Republik Rakyat Cina (RRC) yang kabarnya diterima seluruh masyarakat besar Cina di tanah leluhur. Persaingan dua pemerintahan di negeri orang Cina ini tidak saja menimbulkan perpecahan di kalangan orang Cina, tetapi menimbulkan dampak susulan yang membuat orang Cina semakin tidak jelas posisinya dalam hukum sipil Indonesia. Tetapi yang paling penting dalam kerangka konflik ini, perseteruan sesama Cina memancing perseteruan lain sehingga pemerintah Indonesia turun tangan menanganinya.

Rentetan peristiwa yang melibatkan orang Cina itu merupakan bukti bahwa masyarakat orang Cina di Indonesia merupakan bagian penting dalam babakan sejarah Indonesia. Namun, masyarakat yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat kolonial dan Indonesia ini ternyata tidak memiliki peran demikian dalam sejarah. Historiografi Indonesia dan bahkan orang Cina sendiri cenderung tidak memaknai peranannya dalam sejarah. Hal ini menyebabkan pengetahuan orang bukan-Cina tidak memadai untuk 'mengenal' masyarakat (orang) Cina. Akibatnya, warisan dari masa lampau yang rasis, stereotipik, stigmatif, diskriminatif dan penuh prasangka itu nyaris tidak berubah dari jaman ke jaman. Ia terus hidup di alam pikir masyarakat bukan-Cina dan berkembang bersama dinamika masyarakat itu.

Oleh sebab itu, ada juga baiknya bila yang menulis sejarah orang Cina Medan adalah orang (sejarahwan) Cina sendiri karena akan menunjukkan perspektif yang baru dan pasti akan berbeda. Selain hambatan dari orang Cina sendiri, 'menulis' adalah persoalan lain dalam proses belajar sejarah Cina ini. Bukan hanya sulit untuk merangkai kata-kata, 'namun sulit untuk tetap bertahan sebagai sejarahwan 'netral' bukan-Cina, yang menulis sejarah orang Cina'. Prasangka, stereotipe, sentimen, pandangan kolektif yang negatif dan pengalaman-pengalaman pribadi selama menjalin kontak dengan orang Cina Medan kerap memicu *bias* saat menulis. Bila *bias* mempengaruhi, hasrat untuk menulis bisa jauh lebih besar bila dibanding ketika mencoba menulis 'netral' dengan kerangka yang sudah disiapkan. Inilah pergulatan objektivitas dan subjektivitas dalam (tulisan) sejarah, satu dogma yang sering diacuhkan ketimbang diamalkan oleh sejarahwan.

Sebagai sejarahwan bukan Cina yang mencoba menulis sejarah Cina dalam kerangka penulisan dan penilaian yang positif, pengalaman di lapangan mengajarkan bahwa usaha mencoba meminimalisir kecenderungan pada satu tarikan adalah dengan membangun dan menjaga empati. Dengan begitu, sejarahwan bisa membangun analogi: untuk melakukan apapun harus ada yang memulai. Menulis sejarah adalah sebuah proses dinamis. Apa yang disebut objektivitas dan subjektivitas itu harus bisa dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan, di mana sejarah gemilang orang Cina ditempatkan di bagian mana sejarah kelam orang Cina diposisikan. Topik kekerasan dalam sejarah orang Cina Medan menguras cukup banyak tenaga, terutama untuk menjaga keseimbangan itu.

## **Penutup**

Makalah ini merupakan gambaran analisis dari pengalaman penelitian selama tahun 2004/2005. Sejarah Cina yang misterius itu coba ditelusuri melalui serangkaian peristiwa dalam sejarah Indonesia, terutama mengetahui apa motif dan bentuk-bentuk kekerasan dalam relasi sosial Cina dan bumiputera, terutama pada masa revolusi kemerdekaan. Untuk memudahkan deskripsi dan analisis, saya telah membagi kekerasan dalam dua kategori, *pertama* kekerasan struktural; dan yang *kedua* kekerasan fisik. Kekerasan 'struktural' meliputi segala bentuk praktik diskriminasi oleh pemerintah dalam kehidupan masyarakat yang berdampak luas dalam dinamika sosial Cina-bumiputera, termasuk di dalamnya nasib historiografi kelompok minoritas yang belum atau tidak ditampilkan secara terbuka.

Kekerasan fisik meliputi segala hal yang melibatkan tindakan atau aktifitas ragawi semacam pembunuhan, penganiayaan dan atau gerakan pemusuhan orang-orang Cina dengan menggunakan simbol-simbol tertentu.<sup>11</sup> Tindak kekerasan fisik dalam setiap pergantian rezim adalah kelaziman. Pada beberapa kasus ia terjadi karena akumulasi dari berbagai persoalan sosial dalam relasi Cina-bumiputera. Pada kasus lainnya ia terjadi karena ada kesempatan.

---

<sup>11</sup> Saya mengandalkan artikel Johan Galtung serta artikel bersama, Lester R. Kurtz dan Jennifer Turpin untuk membangun kategorisasi kekerasan ini. Dua artikel tersebut terangkum dalam sebuah buku karya Thomas Santoso (Ed.), *Teori-teori Kekerasan*, Surabaya: Ghalia Indonesia-Universitas Petra Surabaya, 2002. (222 hal.).